

SKRIPSI

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI NAGARI
SIKABU KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

*Diajukan untuk Memenuhi persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SILVY NOFRINA MUKHLIS

1910113130

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 03/PK-VII/V/2025

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI NAGARI SIKABU KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK

Pembangunan Jalan Tol di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman merupakan upaya yang telah diusung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tahun 2012 untuk melakukan Pengadaan Tanah demi kepentingan umum. Namun, pembangunan di salah satu ruas yang melewati Nagari Sikabu terjadi permasalahan pada proses tahapan Pengadaan Tanah yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pasal tersebut menjabarkan 4 tahapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu 1) Bagaimana Prosedur Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apa Hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol dan upaya penyelesaiannya? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai para pihak terkait dalam proses Pengadaan Tanah ini dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tidak berlangsung dengan baik pada salah satu tahapan Pengadaan Tanah yaitu “tahap persiapan”, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun kendala yang dihadapi selama proses Pengadaaan Tanah ini sebagai berikut, sosialisasi yang belum maksimal, dokumen kepemilikan Tanah yang tidak lengkap serta adanya ketidakpastian status kepemilikan Tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jalan Tol Padang-Sicincin

